

Kajian kawasan permukiman Pantai Samas, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta

Agustina Setyaningrum^{a,1*}, Edy Masduqi^{a,2}, Sri Haryanti Prasetyowati^{a,3}, Primanda Kiky Widyaputra^{a,4}, Heny Budi Setyorini^{a,5}

^a Institut Teknologi Yogyakarta, Yogyakarta, Indonesia

¹ agustina678@ity.ac.id*; ² edymasduqi@ity.ac.id; ³ sriharyanti@ity.ac.id ; ⁴ primanda.kiky@ity.ac.id;

⁵henybudis@ity.ac.id

Informasi artikel	ABSTRAK
<p><i>Sejarah artikel</i></p> <p>Diterima : 9 Maret 2023</p> <p>Revisi : 26 Oktober 2023</p> <p>Dipublikasikan : 30 November 2023</p> <p>Kata kunci:</p> <p>Kawasan Permukiman Pesisir Kumuh</p>	<p>Permukiman Pantai Samas berpotensi dipengaruhi oleh berbagai aktivitas masyarakat antara lain aktivitas pariwisata, pertanian dan perikanan. Kondisi permukiman menjadi sangat dinamis. Tujuan dari penelitian ini adalah 1) untuk melakukan penilaian kondisi kawasan permukiman pesisir di wilayah Pantai Samas dan 2) untuk menyusun rekomendasi penanganan kawasan permukiman Pantai Samas. Data primer dikumpulkan melalui diskusi kelompok terarah, wawancara mendalam dengan informan kunci, dan survey lapangan dengan menggunakan kuesioner. Data sekunder diperoleh dari studi literatur dan kajian serupa sebelumnya yang sudah dilakukan. Data yang telah dikumpulkan selanjutnya dianalisis dengan menggunakan analisis statistik deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tidak semua wilayah RT masuk kedalam kategori kumuh. Permasalahan utama penyebab kekumuhan adalah kondisi jalan lingkungan yang rusak, tidak adanya saluran drainase dan belum adanya sistem hidran umum sebagai mitigasi kebakaran. Rekomendasi penanganan rendah untuk melakukan perbaikan jalan lingkungan dan pembangunan saluran drainase dan sistem hidran umum. Kualitas permukiman salah satunya dipengaruhi oleh penyediaan dan kondisi sarana dan prasarana permukiman. Semakin lengkap dan baik kondisinya maka kualitas permukiman menjadi semakin baik.</p>
<p>Keywords:</p> <p><i>Settlement area Coastal Slum</i></p>	<p>ABSTRACT</p> <p>The Samas Beach Settlement has the potential to be affected by various community activities, including tourism, agriculture, and fisheries. The settlement's condition is highly dynamic. The purpose of this research is 1) to assess the condition of the coastal settlement area in the Samas Beach area and 2) to develop recommendations for handling the Samas Beach settlement area. Primary data was collected through directed group discussions, in-depth interviews with key informants, and field surveys using questionnaires. Secondary data was obtained from literature studies and previous similar studies that had been conducted. The collected data was then analyzed using descriptive statistical analysis. The research results showed that not all Neighborhood Association ("Rukun Tetangga"/ RT) areas fell into the slum category. The main problem causing slums is the condition of the damaged environmental roads, the absence of drainage channels, and the absence of a public hydrant system as a fire mitigation measure. Low handling recommendations are to improve</p>

environmental road repairs and develop drainage channels and a public hydrant system. The quality of settlements is influenced by the availability and condition of housing infrastructure, among other factors. The more complete and good the condition is, the better the quality of the settlement becomes.

© 2023 (Agustina Setyaningrum, dkk). All Right Reserved

Pendahuluan

Kawasan permukiman adalah bagian dari lingkungan hidup diluar kawasan lindung, baik berupa kawasan perkotaan maupun perdesaan yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian dan tempat kegiatan yang mendukung perikehidupan dan penghidupan ([Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011](#)). Kondisi permukiman di beberapa wilayah di Indonesia sangat dinamis dan memiliki beragam permasalahan yang berbeda-beda berpotensi menimbulkan permasalahan kawasan permukiman. Air bersih menjadi salah satu permasalahan bagi masyarakat yang bertempat tinggal di tepian sungai ([Amri & Nurhayati, 2017](#)). Terdapat juga permasalahan terkait dengan akses terhadap sarana dan prasarana air limbah ([Afandi et al., 2013](#)). Permasalahan lainnya terkait dengan kualitas lingkungan yang kurang baik terjadi pada beberapa wilayah pesisir ([Pollo et al., 2011](#)), ([A. D. Nugroho, 2019](#)). Kualitas lingkungan yang kurang baik pada kawasan permukiman berpotensi memunculkan kawasan kumuh permukiman. UU No 1 tahun 2011, kawasan permukiman kumuh adalah kawasan yang tidak layak huni yang ditandai dengan ketidakteraturan bangunan, tingkat kepadatan bangunan yang sangat tinggi serta kualitas bangunan dan sarana prasarana tidak memenuhi syarat. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 14/PRT/M/2018 tentang Pencegahan dan Peningkatan Kualitas terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh menyebutkan beberapa kriteria kekumuhan dapat dilihat dari a) bangunan gedung, b) jalan lingkungan, c) penyediaan air minum, d) drainase lingkungan, e) pengelolaan air limbah, f) pengelolaan persampahan dan g) proteksi kebakaran. [Istiqomah & Setyawati \(2016\)](#) dalam kajiannya menyebutkan beberapa aspek

yang berpotensi kualitas permukiman adalah kualitas dinding rumah, kondisi lantai, kondisi dapur, kondisi penerangan jalan, keberadaan tempat sampah, kepadatan penduduk, lokasi permukiman yang berada pada kawasan rawan bencana, jarak permukiman dari fasilitas umum, perilaku masyarakat dan keberadaan serangga.

Wilayah pesisir menjadi salah satu wilayah yang memiliki dinamika yang sangat tinggi sehingga potensi perubahan fungsi lahan dimungkinkan terjadi. Kawasan pesisir Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) memiliki karakteristik dan dinamika wilayah yang beragam. Di Pantai Kuwaru Kabupaten Bantul terjadi kerusakan lingkungan sebagai akibat dari perilaku masyarakat dalam melakukan penebangan pohon cemara udang untuk tambak udang ([Pinto, 2016](#)). Pantai Samas merupakan salah satu pantai di wilayah Kabupaten Bantul. Secara administrasi, Pantai Samas berada di wilayah Pedukuhan Ngepet, Kalurahan Srigading, Kepanewon Sanden, Kabupaten Bantul. Masyarakat yang bertempat tinggal di sekitar Pantai Samas beraktivitas pada sektor jasa pariwisata, pertanian dan perikanan. Beragamnya aktivitas masyarakat yang mendiami kawasan Pantai Samas berpotensi menimbulkan permasalahan lingkungan permukiman. Berdasarkan studi awal bersama dengan tokoh masyarakat setempat, kebutuhan air bersih menjadi salah satu permasalahan yang muncul. Demikian halnya dengan kondisi jalan lingkungan yang mengalami kerusakan pada beberapa lokasi. Pengelolaan air limbah juga belum dikelola dengan baik, dan beberapa rumah tangga langsung membuang air limbah disekitar rumah. Kaitannya dengan permukiman yang layak, setiap warga negara mempunyai hak untuk menempati dan/atau menikmati dan/atau memiliki rumah

yang layak dalam lingkungan yang sehat, aman, serasi, dan teratur. Hal ini juga sejalan dengan *Sustainable Development Goals (SDG's)* dimana target *SDG's* tujuan 11 tentang Sustainable Cities and Communities disebutkan "Membangun Kota dan Permukiman yang Inklusif, Aman, Berketahanan dan Berkelanjutan". Pada tahun 2030 *SDG's* tujuan ke 11 ditargetkan untuk menjamin akses dalam hal perumahan yang layak, aman, terjangkau, akses pelayanan dasar dan penanganan permukiman kumuh ([Sustainable Development Goals, 2017](#)).

Berdasarkan uraian tersebut, maka tujuan dalam penelitian ini adalah melakukan penilaian kondisi kawasan permukiman pesisir di wilayah Pantai Samas serta menyusun rekomendasi penanganan kawasan permukiman Pantai Samas. Kegiatan ini menjadi tahapan awal dalam mengidentifikasi munculnya sebuah kawasan kumuh. Dan diharapkan dapat menjadi salah satu cara untuk mencegah tumbuhnya kawasan kumuh dengan rekomendasi yang diberikan. Kedepan dapat dilanjutkan dengan penyusunan rencana penataan kawasan serta implementasi penataan kawasan. Dengan demikian akan terwujud satu kawasan yang layak huni dan tidak menyebabkan permasalahan lingkungan.

Metode

Penelitian ini dilaksanakan di Pantai Samas, tepatnya di Pedukuhan Ngepet Kalurahan Srigading Kepanewon Sanden Kabupaten Bantul. Penelitian dilaksanakan mulai dari Bulan Desember 2022 hingga Bulan Maret 2023. Data yang dikumpulkan meliputi data sekunder dan data primer. Data sekunder diperoleh dari lembaga/kajian penelitian serupa sebelumnya. Data primer diperoleh langsung dari lapangan. Teknik pengambilan data dilakukan melalui observasi lapangan, survey lapangan dengan menggunakan checklist, wawancara dengan informan kunci dan diskusi kelompok terarah bersama dengan ketua RT dan informan kunci. Berikut disajikan [Gambar 1](#). Pelaksanaan pengambilan data melalui diskusi terarah bersama

dengan masyarakat serta variabel penelitian yang digunakan dalam penelitian ini pada [Tabel 1](#).



Gambar 1. Kegiatan Diskusi Terarah (Sumber : Dokumentasi Peneliti, 2022)

Tabel 1. Variabel Penelitian

Uraian	Variabel	
	Kriteria kekumuhan	Keterangan
Identifikasi kawasan permukiman Pantai Samas	Bangunan gedung	Ketidakteraturan bangunan Kepadatan bangunan tinggi Kualitas bangunan tidak memenuhi persyaratan
	Jalan lingkungan	Jaringan jalan tidak melayani seluruh lingkungan permukiman Kualitas permukaan jalan buruk (retak dan ada perubahan bentuk)
	Penyediaan air minum	Akses aman air minum tidak tersedia Kebutuhan air minum minimal tidak terpenuhi (60 liter/orang /hari)
Drainase lingkungan	Drainase lingkungan tidak ada Drainase lingkungan tidak mampu mengalirkan air hujan dan menimbulkan genangan Ketidakterhubungan dengan sitem drainase	

Uraian	Variabel	
	Kriteria kekumuhan	Keterangan
Pengelolaan air limbah		Kualitas konstruksi drainase buruk System pengelolaan air limbah tidak memenuhi persyaratan teknis (tidak memiliki septitank) Prasana dan saran pengelolahan air limbah tidak memenuhi persyaratan (tidak terhubung tangki septic atau tidak ada system pengolahan limbah setempat/terpusat)
Pengelolaan persampahan		System pengelolaan sampah tidak memenuhi persyaratan teknis (pewadahan-pengumpulan-pengangkutan dan pengolahan) Prasana dan saran persampahan tidak memenuhi persyaratan (tdak ada tempat sampah dan pemilahan sampah, tidak ada sarana pengangkut sampah, tidak ada TPST pada skala lingkungan) Tidak terpeliharanya sarana dan prasarana
Proteksi kebakaran		Prasarana proteksi kebakaran tidak tersedia Sarana proteksi kebakaran tidak tersedia

Sumber : Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat No 14/PRT/M/2018

Penilaian kekumuhan permukiman pesisir Pantai Samas menggunakan penilaian kekumuhan berdasarkan pada Permen PUPR No 14 tahun

2018. Dalam penilaiannya setiap sub kriteria akan diberikan skor berdasarkan penilaian berikut ini pada [Tabel 2](#) dan [Tabel 3](#) Klasifikasi Tingkat Kekumuhan.

Tabel 2 Penilaian Tingkat Kekumuhan

Kualitas	Rentangan	Skor
Kualitas Baik	0%-25%	0
Kualitas Cukup Baik	26%-50%	1
Kualitas Buruk	51%-71%	3
Kualitas Sangat Buruk	76%-100%	5

Sumber : (Perkim.Id, 2020 dan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, 2018)

Penilaian setiap indikator menggunakan rumus :

Keterangan

Si : Total skor pada setiap indikator

Bi : Skor Sub Kriteria

P : Jumlah Sub Kriteria

Tabel 3 Klasifikasi Tingkat Kekumuhan

Klasifikasi tingkat kekumuhan	
Bukan kawasan kumuh	: 0 – 8,75
Kawasan kumuh ringan	: 8,76 – 17,50
Kawasan kumuh sedang	: 17,51 – 26,25
Kawasan kumuh berat	: 26,26

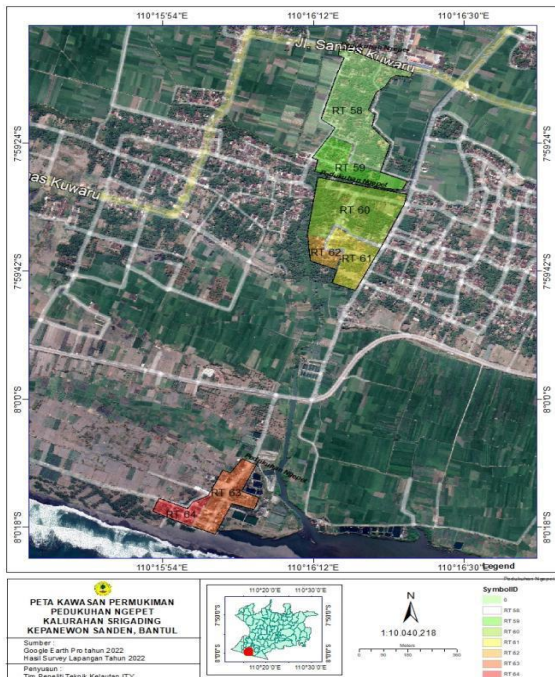
Sumber : (Perkim.Id, 2020 dan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, 2018)

Data yang sudah dikumpulkan selanjutnya diolah dengan menggunakan rumus diatas. Data-data diolah dan di susun profil wilayah dan selanjutnya dianalisis dengan menggunakan analisis deskriptif.

Hasil dan pembahasan

Permukiman di Pantai Samas termasuk kedalam wilayah Dusun Ngepet, Kalurahan Srigading, Kepanewon Sanden. Terdapat 5 RT yaitu RT 58, RT59, RT60, RT61, RT62, RT63 dan RT 64. Wilayah RT yang berada di Pantai Samas adalah RT 63 dan RT 64. Wilayah RT 63 dan 64 berada pada kawasan pariwisata Pantai Samas

sedangkan RT lainnya berada pada kawasan perdesaan pesisir dengan dominasi lahan pertanian. Berdasarkan diskusi terarah yang dilakukan bersama dengan ketua RT dan tokoh masyarakat di Dusun Ngepet disajikan Peta wilayah Dusun Ngepet Pada [Gambar 2](#).



Gambar 2. Peta Kawasan Permukiman Pesisir Pantai Samas (Olah Data, 2023)

Variabel penilaian kawasan permukiman dimulai dengan identifikasi bangunan gedung, jalan lingkungan, penyediaan air minum, drainase lingkungan, pengelolaan air limbah, pengelolaan persampahan dan proteksi kebakaran. Kondisi bangunan gedung sangat beragam, umumnya bangunan memiliki ketaraturan antara 35%-65% dengan tingkat kepadatan bangunan rendah. Namun demikian, untuk permukiman yang berada pada RT 63 dan 64 masih ditemukan bangunan semi permanen. Kepadatan yang rendah ini tidak terlepas dari kawasan perdesaan yang masih terdapat lahan yang luas sehingga jarak antar rumah tidak terlalu dekat serta kepadatan penduduk yang rendah yaitu kurang dari 80 unit/Ha. Kondisi yang sama juga terjadi di desa-desa pesisir di Kabupaten Kulonprogo dimana

memiliki kepadatan penduduk yang rendah ([Marwasta & Priyono, 2007](#)).

Kondisi jalan lingkungan di seluruh kawasan permukiman di sekitar Pantai Samas telah melayani seluruh lingkungan permukiman. Namun demikian kualitas jalan dalam kondisi kurang baik. Beberapa jalan mengalami kerusakan sehingga mengganggu pengguna jalan saat melewatinya. Kaitannya dengan pengelolaan air minum, hanya RT 63 dan RT 64 yang memiliki kualitas air minum yang kurang baik. Pada kedua RT ini, beberapa masyarakat menggunakan air kemasan untuk memenuhi kebutuhan air minum. Sumber air minum menggunakan air sumur. Menurut masyarakat setempat beberapa air sumur memiliki kualitas air yang kurang baik sehingga untuk air minum menggunakan air kemasan.

Dibeberapa lokasi ditemukan drainase lingkungan. Namun, tidak banyak drainase lingkungan yang berada di kanan kiri jalan lingkungan. Umumnya jalan lingkungan tidak memiliki drainase lingkungan ([Gambar 3](#)). Kondisi ini yang menyebabkan terjadinya kerusakan jalan lingkungan. Air hujan tidak bisa langsung dialirkan dan kadang-kadang menjadi genangan yang berpotensi merusak jalan. Apabila banyak air menggenang pada jalan, menunjukkan bahwa saluran drainase kurang berfungsi dengan baik, jalan berubah menjadi aliran air ([Maizir, 2017](#)). Demikian halnya dengan kondisi pengelolaan limbah, dibebeberapa lokasi masih ditemukan belum adanya peresapan untuk pengelolaan limbah. Gambar kondisi pembuangan limbah di sajikan dalam [Gambar 4](#).

Terkait dengan pengelolaan persampahan, belum semua wilayah memiliki sistem pengelolaan sampah yang baik. Beberapa wilayah RT telah melakukan pengangkutan sampah namun, masih ada sampah yang di buang dibelakang rumah dan selanjutnya dibakar. RT yang telah melakukan pemilahan sampah adalah RT 58, RT 60, RT 61, RT 63 dan RT 64. Aktivitas pemilahan sampah ini telah mendukung program Pemerintah Daerah dalam upaya mengurangi sampah. Beberapa wilayah di Kabupaten Bantul

juga melakukan aktivitas pemilahan sampah dengan mengelompokkan menjadi sampah plastik, sampah organik dan [residu \(Suharta & Putri, 2022\)](#). Pemerintah Kabupaten Bantul memiliki komitmen yang tinggi terhadap upaya penanganan sampah yang ditujukan melalui Program Bantul Bersih Sampah 2025. Sosialisasi terus dilakukan oleh pemerintah untuk mengubah pola pengelolaan sampah masyarakat. Kedepan setiap wilayah di Kabupaten Bantul harus mampu melakukan upaya pemilahan sampah sehingga mengurangi sampah yang dibuang ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA) sampah.

Hidran umum merupakan salah satu alat untuk mitigasi bencana kebakaran. Pada seluruh permukiman di sekitar Pantai Samas, belum

tersedia hidran kebakaran sebagai alat untuk proteksi kebakaran. Untuk wilayah RT 63 dan RT 64 keberadaan hidran umum cukup penting untuk diadakan. Kedua wilayah ini memiliki bangunan yang lebih padat apabila dibandingkan dengan wilayah lainnya. Selain itu, wilayah ini juga berada pada kawasan pariwisata, sehingga lebih banyak masyarakat yang datang ke kedua wilayah ini. Pengadaan system hidran khususnya hidran halaman sangat penting untuk alat proteksi kebakaran, ketiadaan hidran pada kawasan permukiman meningkatkan risiko kebakaran pada saat terjadi kebakaran ([Mantra, 2005](#)).

Berdasarkan kondisi kawasan permukiman tersebut, penilaian kondisi permukiman pesisir Pantai Samas disajikan dalam [Tabel 4](#).

Tabel 4. Penilaian Kondisi Permukiman disekitar Pantai Samas

Parameter	Sub Kriteria	RT	RT	RT	RT	RT	RT	RT
		58	59	60	61	62	63	64
Kondisi Bangunan Gedung	Ketidakteraturan bangunan	1	1	1	0	1	1	1
	Tingkat kepadatan bangunan	0	0	0	0	0	0	0
	Kualitas bangunan tidak memenuhi persyaratan	0	0	0	0	0	1	0
	Si 1	0,3	0,3	0,3	0	0,3	0,7	0,3
Kondisi jalan lingkungan	Jaringan jalan tidak melayani seluruh lingkungan permukiman	0	0	0	0	0	0	0
	Kualitas permukaan jalan buruk (retak da nada perubahan bentuk)	1	1	1	1	1	1	1
	Si 2	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
Kondisi penyediaan air minum	Ketidakterediaan akses aman air minum	0	0	0	0	0	1	1
	Kebutuhan air minum minimal tidak terpenuhi (60 liter/orang /hari)	0	0	0	0	0	1	1
	Si 3	0	0	0	0	0	1	1
Kondisi drainase lingkungan	Drainase lingkungan tidak mampu mengalirkan air hujan dan menimbulkan genangan	1	1	1	1	0	1	0
	Drainase lingkungan tidak ada	1	1	1	1	1	1	1
	Ketidakterhubungan dengan sitem drainase	1	1	1	1	1	1	1
	Kualitas kontruksi drainase buruk	1	1	1	1	1	1	1
	Si 4	1	1	1	1	0,75	1	0,75
Kondisi pengelolaan air limbah	System pengelolaan air limbah tidak memenuhi persyaratan teknis (tidak memiliki septitank)	1	1	1	1	1	1	1

Parameter	Sub Kriteria	RT	RT	RT	RT	RT	RT	RT
		58	59	60	61	62	63	64
	Prasana dan saran pengolahan air limbah tidak memenuhi persyaratan (tidak terhubung tangki septic atau tidak ada system pengolahan limbah setempat/terpusat)	1	1	1	1	1	1	1
	Si 5	1	1	1	1	1	1	1
Kondisi pengelolaan persampahan	Prasana dan saran persampahan tidak memenuhi persyaratan (tidak ada tempat sampah dan pemilahan sampah, tidak ada TPS, tidak ada sarana pengangkut sampah, tidak ada TPST pada skala lingkungan)	1	1	1	1	0	0	0
	System pengelolaan sampah tidak memenuhi persyaratan teknis (pewadahan-pengumpulan-pengangkutan dan pengolahan)	1	1	1	1	1	1	1
	Tidak terpeliharanya sarana dan prasarana	0	1	0	1	0	0	0
	Si 6	0,7	1,0	0,7	1,0	0,3	0,3	0,3
Kondisi Proteksi Kebakaran	Prasarana proteksi kebakaran tidak tersedia	5	5	5	5	5	5	5
	Sarana proteksi kebakaran tidak tersedia	5	5	5	5	5	5	5
	Si 7	5	5	5	5	5	5	5
Total Nilai		8,5	8,8	8,5	8,5	7,9	9,5	8,9

Sumber : olah data, 2023



Gambar 3 Kondisi jalan lingkungan yang tidak memiliki saluran drainase
(Sumber : Dokumentasi Peneliti, 2022)



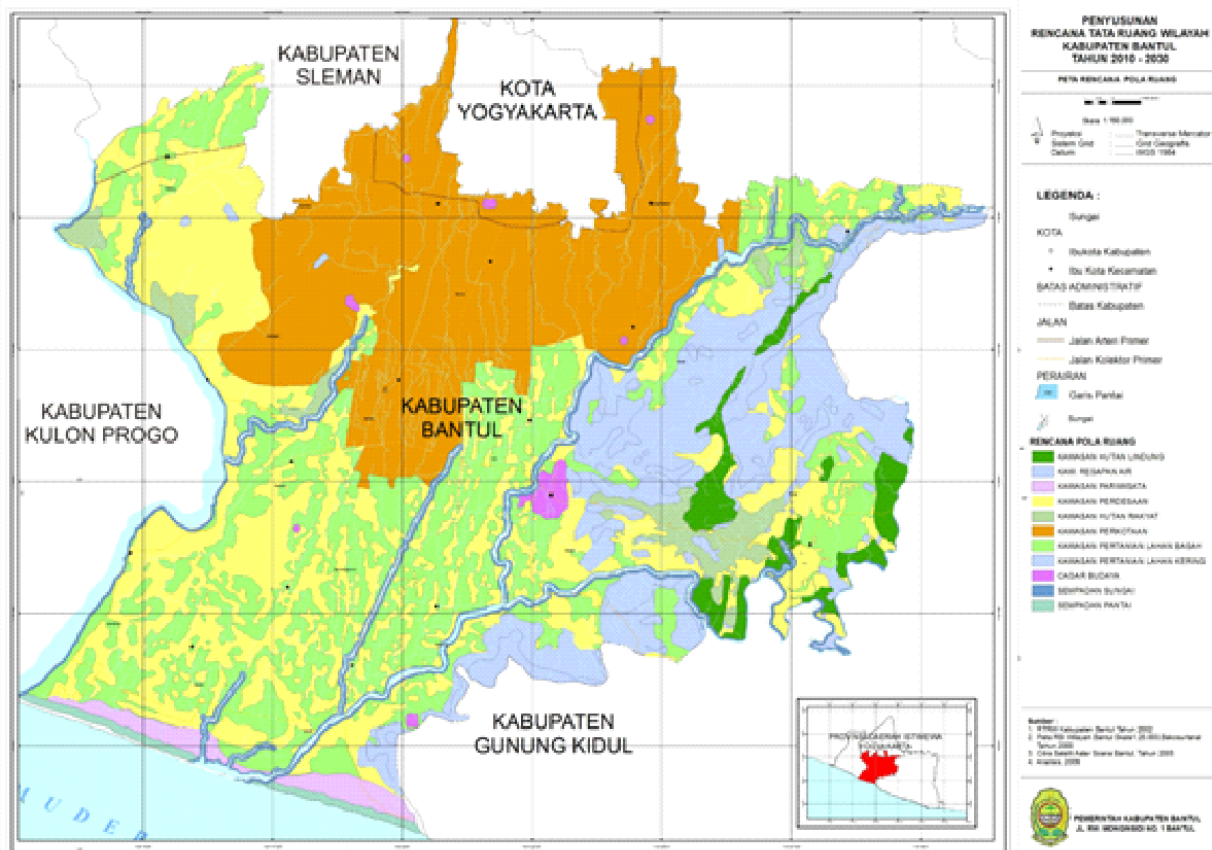
Gambar 4 Kondisi saluran air limbah
(Sumber : Dokumentasi Peneliti, 2022)

Berdasarkan nilai total yang diperoleh terdapat beberapa RT yang tidak masuk dalam kategori kumuh karena memiliki nilai dibawah 8,75 yaitu RT 58, RT 60, RT 61, RT 62. Sedangkan RT 59, RT 63 dan RT 64 masuk dalam kategori

kumuh ringan. Permasalahan belum adanya saluran drainase, kerusakan jalan lingkungan, pengelolaan air limbah yang belum memenuhi persyaratan teknis dan belum adanya sistem hidran umum kebakaran menjadi penyebab

meningkatnya indikator kekumuhan. Pada beberapa kajian lainnya kekumuhan yang terjadi juga disebabkan karena kondisi sanitasi yang kurang baik dan kurang memenuhi persyaratan (Zuhro et al.,2019). Kajian lainnya yang dilakukan oleh Hanifah & Widyastuti (2016) di wilayah pesisir Kota Semarang juga menunjukkan hal serupa dimana sistem drainase yang buruk dan tidak berfungsi kondisi sanitasi yang kurang baik menjadi salah satu penyebab meningkatkan kekumuhan. lainnya

kekumuhan yang terjadi juga disebabkan karena kondisi sanitasi yang kurang baik dan kurang memenuhi persyaratan (Zuhro et al.,2019). Kajian lainnya yang dilakukan oleh Hanifah & Widyastuti (2016) di wilayah pesisir Kota Semarang juga menunjukkan hal serupa dimana sistem drainase yang buruk dan tidak berfungsi, kondisi sanitasi yang kurang baik menjadi salah satu penyebab meningkatkan kekumuhan. **Gambar 5**



Gambar 5 Peta Peta Pola Ruang RTRW Kabupaten Bantul tahun 2010-2030 sumber (Pemerintah Kabupaten Bantul, 2010)

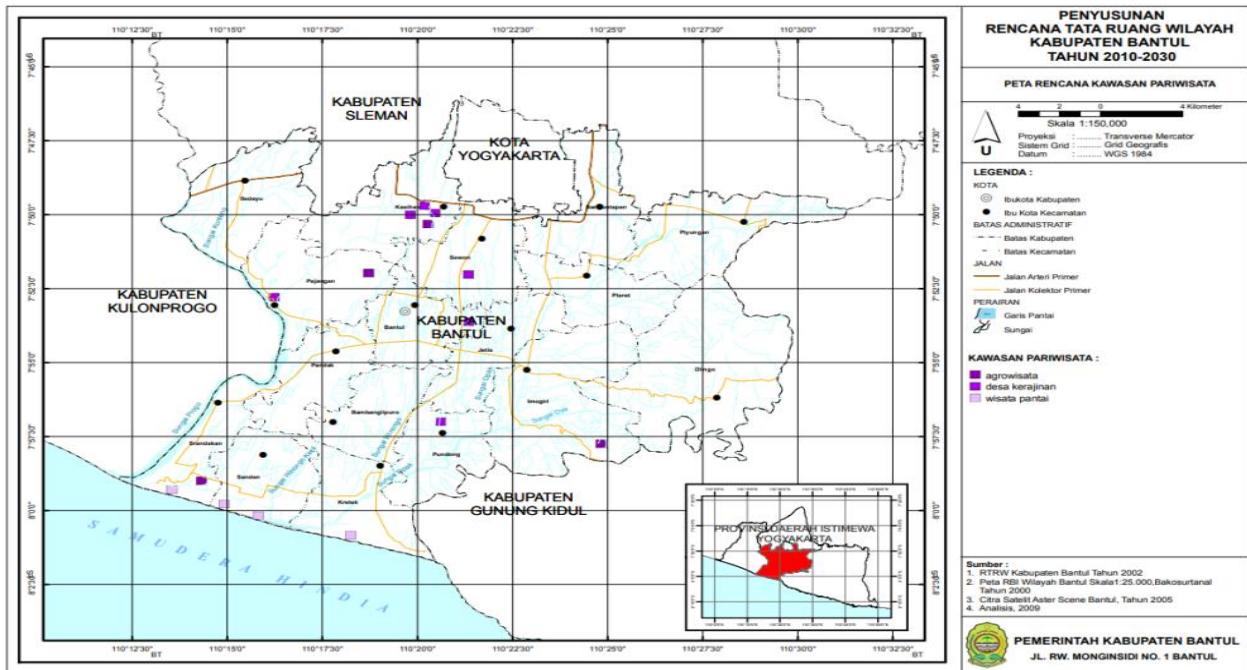
Rekomendasi Penanganan Kawasan

Kawasan permukiman Pantai Samas masuk dalam wilayah Pedukuhan Ngepet dan

terdiri dari enam RT yaitu RT 58, RT 59, RT 60, RT61, RT 62, RT 63 dan RT 64. Berdasarkan pada

pola ruang yang tertuang dalam Pola Ruang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Bantul tahun 2010-2030, maka wilayah RT 58, RT 59, RT 60, RT 61 dan RT 62 berada pada kawasan perdesaan. Penanganan kawasan permukiman secara umum perlu diarahkan pada pembangunan saluran drainase. Secara umum kondisi permukiman masih cukup

baik dan perlu penanganan pada beberapa infrastruktur permukiman Kondisi ini sudah sesuai peruntukannya dan dominasi penggunaan lahan adalah sebagai kawasan pertanian. Sedangkan wilayah RT 63 dan 64 berada pada kawasan pariwisata.. Berikut disajikan Peta Pola Ruang RTRW Kabupaten Bantul tahun 2010-2030 pada [Gambar 6](#).



Gambar 6 5 Peta Rencana Kawasan Pariwisata RTRW Kabupaten Bantul tahun 2010-2030 (Sumber: Pemerintah Kabupaten Bantul, 2010)

Rekomendasi penanganan permukiman diuraikan dari hasil pendataan kawasan yang telah dilakukan. Berdasarkan identifikasi permasalahan yang diuraikan di atas maka rekomendasi yang diberikan untuk permukiman RT 59 yaitu berupa peremajaan dengan rekomendasi prioritas penanganan berupa pembangunan saluran air hujan, pembangunan saluran air limbah. Rekomendasi penanganan beberapa permasalahan di wilayah RT 60 antara lain perlu dilakukan peremajaan lingkungan dengan prioritas penanganan tergolong kategori rendah terutama untuk pembangunan jalan lingkungan. Penanganan permasalahan di wilayah RT 60

didukung dengan kesesuaian lokasi tersebut dalam pola ruang kawasan perdesaan. Rekomendasi penanganan RT 62 adalah peremajaan dengan prioritas penanganan rendah yaitu dengan dilakukan pembangunan jalan lingkungan dan penambahan penerangan jalan. Peremajaan menjadi pilihan dalam upaya penanganan kawasan permukiman RT63 dengan rekomendasi penanganan sedang melalui upaya perbaikan saluran air hujan, pembangunan jalan lingkungan dan pengelolaan persampahan. Untuk lebih jelasnya berikut disajikan [Tabel 6](#) rekomendasi penanganan kawasan.

Tabel 6 Rekomendasi Penanganan Kawasan

No	Kawasan Permukiman	Kategori permukiman	Rekomendasi penanganan
1	RT 58	Tidak Kumuh	Rendah (pembangunan saluran air hujan disepanjang jalan lingkungan)
2	RT 59	Kumuh rendah	Rendah (pembangunan saluran air hujan, pembangunan saluran air limbah)
3	RT 60	Tidak Kumuh	Rendah (perbaikan jalan lingkungan dan pembangunan saluran drainase)
4	RT 61	Tidak Kumuh	Rendah (pembangunan saluran air hujan, dan perbaikan jalan lingkungan)
5	RT 62	Tidak Kumuh	Rendah (perbaikan jalan lingkungan, pembangunan saluran drainase)
6	RT 63	Kumuh rendah	Sedang (pembangunan saluran air hujan, perbaikan jalan lingkungan, pembangunan sistem hidran dan penyediaan air minum)
7	RT 64	Kumuh rendah	Sedang (pembangunan saluran air limbah, perbaikan jalan lingkungan, pembangunan saluran air hujan, pembangunan system hidran dan penyediaan air minum)

Sumber : Analisis data, 2023

Simpulan

Hasil pendataan kawasan menunjukkan bahwa tidak semua wilayah RT masuk dalam kategori kumuh, hanya 3 RT yang masuk dalam kategori rendah. Permasalahan utama yang muncul terkait dengan permukiman di Pantai Samas adalah belum adanya saluran drainase, kerusakan jalan lingkungan, pengelolaan air limbah yang belum memenuhi persyaratan teknis dan belum adanya sistem hidran umum kebakaran menjadi penyebab meningkatnya indikator kekumuhan. Rekomendasi penanganan kekumuhan dengan upaya pembangunan saluran air hujan, perbaikan jalan lingkungan dan pembangunan sistem hidran untuk mitigasi kebakaran. Berdasarkan kajian ini menunjukkan bahwa kualitas permukiman sangat dipengaruhi oleh penyediaan dan kondisi sarana dan prasarana permukiman yang ada. Semakin lengkap ketersediaan sarana dan prasarana permukiman dan semakin baik kondisinya

maka kualitas permukiman menjadi semakin baik. Saran yang dapat diberikan untuk kajian selanjutnya adalah kedepan dapat dilaksanakan kajian terkait dengan

kualitas permukiman secara lebih luas di Kalurahan Srigading. Aktivitas pertanian, pariwisata dan dibukanya jembatan Kretek II kemungkinan mempengaruhi karekteristik permukiman. Rekomendasi penanganan dapat menjadi referensi bagi pemerintah setempat dalam hal pembangunan dan peningkatan kualitas infrastruktur perdesaan.

Ucapan terima kasih

Ucapan terima kasih kepada LP2M ITY yang telah memberikan dukungan pendanaan dalam pelaksanaan penelitian ini. Ucapan terima kasih juga diberikan kepada masyarakat Pedukuhan Ngepet dan Pemerintah Kalurahan Srigading yang telah berpartisipasi dan memberikan perizinan kegiatan penelitian ini.

Referensi

- Afandi, Y. V., Sunoko, H. R., & Kismartini, K. (2013). Pengelolaan Air Limbah Domestik Komunal Berbasis Masyarakat di Kota Probolinggo. *Prosiding Seminar Nasional Pengelolaan Sumberdaya Alam Dan Lingkungan* 2013. <https://doi.org/10.14710/jil.11.2.100-109>
- Amri, F., & Nurhayati, -. (2017). Kajian Penyediaan Air Bersih Untuk Masyarakat Tepian Sungai Kapuas Di Kota Pontianak. *Jurnal Teknik Sipil*, 17(2), 1–14. <https://doi.org/10.26418/jtsft.v17i2.25633>
- Hanifah, W., & Widyastuti, D. (2016). Penilaian Lingkungan Fisik Permukiman Kumuh di Kawasan Pesisir Kota Semarang. *Jurnal Bumi Indonesia*, 1(1).
- Istiqomah, A., & Setyawati, S. (2016). Kualitas Lingkungan Hunian Tetap Masyarakat Korban Erupsi Gunung Merapi Tahun 2010. *Geomedia*, 14(November), 87–95.
- Maizir. (2017). Evaluasi Kegagalan Pembangunan Drainase Dalam Lingkungan Daerah Pemukiman. *Jurnal Teknik Sipil ITP*, 4(2), 24–28. <https://ejournal.itp.ac.id/index.php/tsipil/article/view/897>
- Mantra, I. B. G. W. (2005). Kajian Penanggulangan Bahaya Kebakaran Pada Perumahan (Suatu Kajian Pendahuluan di Perumahan Sarajadi Bandung). *Jurnal Permukiman Natak*, 3(1), 1–61.
- Marwasta, D., & Priyono, K. D. (2007). Analisis Karakteristik Permukiman Desa-Desa Pesisir di Kabupaten Kulonprogo. *Forum Geografi*, 21(1), 57–68. <https://doi.org/10.23917/forgeo.v21i1.1819>
- Nugroho, A. D. (2019). Kajian Pemanfaatan Ruang Kawasan Pesisir Studi Kasus Kawasan Permukiman Kumuh Kelurahan Padarni Kabupaten Manokwari. *Jurnal Cassowary*, 2(2), 128–146.
- Pemerintah Kabupaten Bantul. (2010). *Peta Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bantul 2010- 2030 Rencana Pola Ruang*. Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bantul. <https://data.bantulkab.go.id/beranda/publikasi.php>
- Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. (2018). *Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 14/PRT/M/2018 tentang Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh*. <http://www.pu.go.id/>
- Pinto, Z. (2016). Kajian Perilaku Masyarakat Pesisir yang Mengakibatkan Kerusakan Lingkungan (Studi Kasus di Pantai Kuwaru, Desa Poncosari, Kecamatan Srandakan, Kabupaten Bantul, Provinsi DIY). *Jurnal Wilayah Dan Lingkungan*, 3(3), 163. <https://doi.org/10.14710/jwl.3.3.163-174>
- Pollo, J. Y., Tondobala, L., & Sela, R. L. (2011). *Ketersediaan infrastruktur permukiman kumuh pesisir studi kasus : desa likupang dua dan desa likupang kampung ambong, kecamatan likupang timur, kabupaten minahasa utara, provinsi sulawesi utara*.
- Suharta, R., & Putri, O. B. (2022). Optimalisasi Pengelolaan Sampah Berbasis Rumah Tangga Menuju Bantul Bersih Sampah Tahun 2025. *Jurnal Riset Daerah*, XXIII(3), 4294–4307. <https://ojs.bantulkab.go.id/index.php/jrd/article/view/81>
- Sustainable Development Goals. (2017). Sustainable Development Goals. In *SDG 2030 Indonesia*. <https://www.sdg2030indonesia.org/page/19-tujuan-sebelas>
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011. (2011). Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman. In *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011*.
- Zuhro, L., Wesnawa, I. G. A., & Sarmita, I. M. (2019). Kualitas Permukiman Nelayan

Wilayah Pesisir Di Desa Anturan
Kecamatan Buleleng (Kajian Kualitas
Permukiman Skala Mikro). *Jurnal*

Pendidikan Geografi Undiksha, 7(3), 113–
121.